



# **LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE  
PROVINSI ACEH**

**PADA RESES MASA PERSIDANGAN V  
TAHUN SIDANG 2022 - 2023**

**TANGGAL 14 – 18 JULI 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI ACEH  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V  
TAHUN SIDANG 2022 - 2023  
TANGGAL 14 – 18 JULI 2023**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja dalam rangka reses. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 - 2023 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga), yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

## **B. Dasar Kegiatan**

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 -2023.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 - 2023 tanggal 16 Mei 2023.

## **C. Maksud dan Tujuan**

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor Pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI, yaitu bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan.

## **D. Kegiatan**

Pertemuan dengan:

1. Gubernur Provinsi Aceh beserta jajaran;
2. Perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Aceh;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh beserta jajaran;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh beserta jajaran;
5. Kepala BKKBN Aceh beserta jajaran;
6. Kepala Balai Besar POM di Aceh beserta jajaran;
7. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh beserta jajaran;
8. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara beserta jajaran;
9. Kepala BP3MI Aceh beserta jajaran;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh.

## **E. Peserta**

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses ke Provinsi Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, **Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.**, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses sebagai berikut:

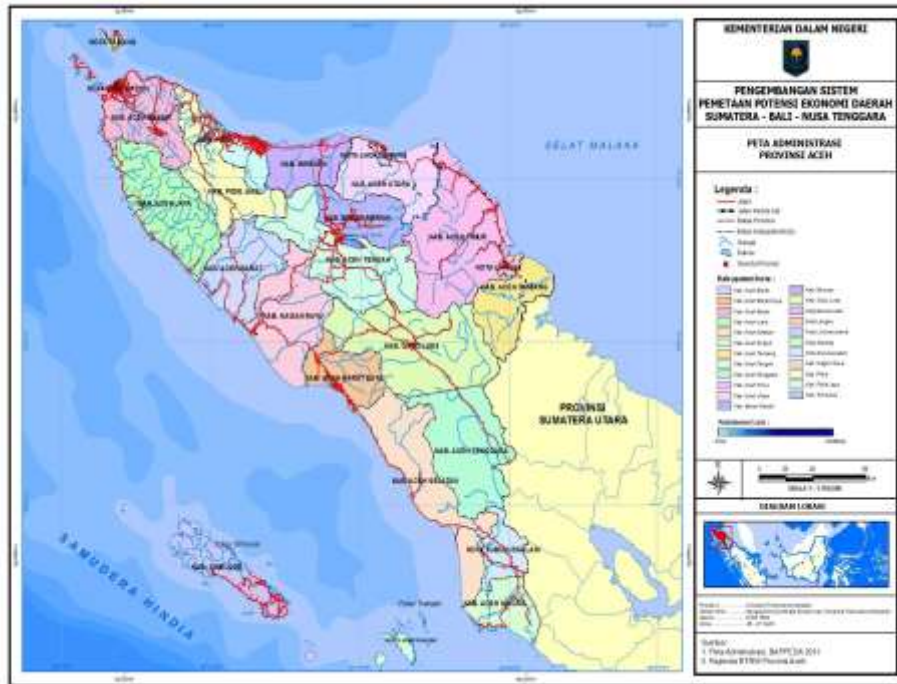
NO	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-425	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.	KETUA TIM / WK.KETUA KOMISI IX DPR RI	PKS	DKI JAKARTA II
2.	A-393	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.	KETUA KOMISI IX DPR RI	NASDEM	SULUT
3.	A-182	Dr. H. EDY WURYANTO, S. KP., M. Kep.	ANGGOTA	PDIP	JATENG III
4.	A-212	KRIS DAYANTI	ANGGOTA	PDIP	JATIM V
5.	A-271	Drs. H. DARUL SISKHA	ANGGOTA	GOLKAR	SUMBAR I
6.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.	ANGGOTA	GOLKAR	JABAR IV
7.	A-320	M. YAHYA ZAINI, SH.	ANGGOTA	GOLKAR	JATIM VIII
8.	A-70	Dr. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.	ANGGOTA	GERINDRA	JAMBI
9.	A-90	drg. PUTIH SARI	ANGGOTA	GERINDRA	JABAR VIII
10.	A-380	NURHADI, S.Pd	ANGGOTA	NASDEM	JATIM VI
11.	A-30	H. SUKAMTO, S.H	ANGGOTA	PKB	D.I.Y
12.	A-531	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD	ANGGOTA	DEMOKRAT	JAMBI
13.	A-545	LINDA MEGAWATI, S.E., M. Si	ANGGOTA	DEMOKRAT	JABAR IX
14.	A-571	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E.	ANGGOTA	DEMOKRAT	SULSEL I
15.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	ANGGOTA	PKS	SUMUT III
16.	A-453	H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.	ANGGOTA	PKS	KALBAR I
17.	A-494	DIAN ISTIQOMAH, S. Kep	ANGGOTA	PAN	DKI JAKARTA III
18.	A-465	Hj. NURHAYATI	ANGGOTA	PPP	JABAR XI

## II. GAMBARAN UMUM PROVINSI ACEH

Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera sebagai batas paling barat negara Indonesia. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh yaitu sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Sebagai provinsi yang mendapat julukan Serambi Mekah, Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan Aceh dinyatakan dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Prov. Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, dan yang terakhir dinyatakan dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pada dasarnya penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Selain itu, sebagai daerah istimewa, Aceh diberi keleluasaan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh dalam bentuk peraturan perundangan-undangan daerah sesuai dengan syariat Islam yang dikenal dengan nama Qanun. Untuk mendanai seluruh kewenangan otonomi khusus, beberapa jenis transfer daerah yang diberikan ke Aceh persentasenya ditetapkan lebih tinggi dari daerah yang lain, selain itu Provinsi Aceh juga menerima pendanaan dari Pusat yang sifatnya khusus dan termasuk salah satu jenis dana penyesuaian, dana tersebut adalah dana otonomi khusus.

Sejak 1 Juni 2010, pemerintah Provinsi Aceh meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan target semua penduduk dari segala strata sosial dibebaskan dari beban finansial saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota, RSUD Provinsi Aceh, dan juga RS Pusat Rujukan di dalam dan luar Aceh. JKA merupakan jaminan kesehatan pertama di Indonesia yang mempunyai kepesertaan seluruh masyarakat aceh (*Universal Health Coverage*). Dengan JKA, masyarakat Aceh dapat mengakses sarana pelayanan kesehatan berkualitas yang dibangun lebih baik pasca-rehabilitasi dan rekonstruksi. Program JKA kemudian dirubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).



Gambar 1. Peta Provinsi Aceh.

Berdasarkan data dari BPS yang dirilis pada Agustus 2022, Jumlah penduduk Aceh yang masuk dalam kategori Penduduk Usia Kerja (PUK) sebanyak 4.019.977 jiwa. Sedangkan yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebanyak 2.552.562 orang. Dari jumlah tersebut penduduk yang bekerja sebanyak 2.394.994 jiwa dan yang masuk pengangguran terbuka sebanyak 157.568 jiwa. Sementara itu, penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja sebesar 1.467.415 orang (Terdapat 370.839 orang yang sekolah, yang mengurus rumah tangga ada 867.501 orang dan lainnya 229.075 orang). Dengan demikian jika dipresentase, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63.50 persen sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 6.17 persen. Sedangkan pekerja tidak penuh sebanyak 922.075 orang. Rinciannya, setengah penganggur sebanyak 240.455 orang dan pekerja paruh waktu 671.620 orang.

JENIS KEGIATAN TYPE OF ACTIVITY	PENDUDUK ACEH BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN SELAMA SEMINGGU YANG LALU ACEH POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER BY TYPE OF ACTIVITY DURING THE PREVIOUS WEEK (TAHUN/ YEARS 2020 – 2022)					
	PERKOTAAN+PERDESAAN / URBAN+RURAL					
	LAKI-LAKI+PEREMPUNIAN/ MALE+FEMALE					
	TAHUN/ YEARS					
	2020		2021		2022	
	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER	3 772 260	3 881 102	3 772 260	3 951 368	3 920 239	4 019 977
ANGKATAN KERJA/ ECONOMICALLY ACTIVE	2 510 358	2 526 505	2 510 358	2 520 157	2 514 842	2 552 562
BEKERJA/ WORKING	2 374 294	2 359 905	2 374 294	2 361 300	2 364 666	2 394 994
PENGANGGURAN TERBUKA/ UNEMPLOYMENT	136 064	166 600	136 064	158 857	150 176	157 568
BUKAN ANKATAN KERJA/ NOT ECONOMICALLY ACTIVE	1 261 902	1 354 597	1 261 902	1 431 211	1 405 397	1 467 415
SEKOLAH/ ATTENDING SCHOOL	368 298	364 266	368 298	328 898	351 060	370 839
MENGURUS RUMAH TANGGA/ HOUSE KEEPING	740 485	763 324	740 485	816 171	802 503	867 501
LAINNYA/ OTHERS	153 119	227 007	153 119	286 142	251 834	229 075
TPAK (TINGKAT PARTISIPASI ANKATAN KERJA) LABOR FORCE PARTICIPATION RATE (%)	66,55	65,10	66,55	63,78	64,15	63,50
TPT (TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA) UNEMPLOYMENT RATE (%)	5,42	6,59	5,42	6,30	5,97	6,17
PEKERJA TIDAK PENUH (LESS THAN NORMAL WORKING HOUR) SETENGAH PENGANGGUR (UNDEREMPLOYMENT)	872 536	1 092 598	872 536	1 061 054	1 019 678	922 075
PEKERJA PARUH WAKTU (PART TIME WORKER)	237 995	381 909	237 995	310 759	260 974	250 455
	634 541	710 689	634 541	750 295	758 704	671 620

Kedaaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2022/Labour Force Situation in Aceh Province August 2022

3

Menilik tenaga kerja berdasarkan wilayah tinggal penduduk, BPS menyebutkan bahwa Penduduk Aceh yang tinggal di perkotaan sangat banyak yang bekerja pada jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Jumlah rerata dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu 245 ribu orang. Jumlah ini sempat mengalami penurunan pada Februari 2022 sebesar 210 ribuan. Pekerjaan kedua yang banyak dilakukan penduduk kota di Aceh yaitu bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan perburuan dan perikanan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Tahun 2020 bulan Februari sebanyak 103.893 orang. Sedangkan pada bulan Agustus 2022 meningkat menjadi 135.658 orang. Masih sangat sedikit penduduk Aceh kota yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian (sebanyak 6.430 orang), listrik gas dan Air minum (5.258 orang). (lihat tabel di bawah)

TABEL C.2 PENDUDUK ACEH BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SELAMA SEMINGGU YANG LALU MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA  
 TABLE ACEH POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER WHO WORKED DURING THE PREVIOUS WEEK BY MAIN INDUSTRY  
 (TAHUN/ YEARS 2020 – 2022)

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA/ MAIN INDUSTRY*	LAKI-LAKI+PEREMPUAN/MALE+FEMALE					
	TAHUN/ YEARS					
	2020		2021		2022	
	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	103 893	109 800	108 690	114 082	112 208	135 658
2	2 459	4 500	1 074	5 135	5 009	6 430
3	70 527	80 641	68 195	83 433	90 791	67 062
4	5 899	8 538	11 467	7 154	3 412	5 258
5	42 320	45 912	47 504	47 310	60 653	57 780
6	194 408	201 795	238 384	216 008	251 984	202 886
7	28 821	44 629	40 723	44 091	48 991	39 098
8	23 934	19 300	26 335	17 894	11 979	23 844
9	247 549	240 539	240 367	240 643	210 230	245 838
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>719 710</b>	<b>755 662</b>	<b>782 799</b>	<b>784 750</b>	<b>795 257</b>	<b>783 834</b>

CATATAN/NOTE:

\*) 1. PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERBURUAN, DAN PERIKANAN / AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHERY 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN / MINING AND QUARRYING 3. INDUSTRI PENGOLAHAN / MANUFACTURING INDUSTRY 4. LISTRIK, GAS, DAN AIR MINUM / ELECTRICITY, GAS AND WATER 5. KONSTRUKSI / CONSTRUCTION 6. PERDAGANGAN, RUMAH MAKAN, DAN JASA AKOMODASI / TRADE, RESTAURANT AND HOTELS 7. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI / TRANSPORTATION, STORAGE AND COMMUNICATION 8. LEMBAGA KEUANGAN, REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN / FINANCING, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICE 9. JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN PERORANGAN / COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE

Sedangkan penduduk Aceh yang tinggal di pedesaan lebih banyak yang bekerja di sektor perkebunan, perikanan, pertanian dan perburuan dengan jumlah sebesar 834.334 orang pada Agustus 2022. Dengan jumlah yang dari tahun ke tahun relatif sama atau tidak terjadi penurunan yang tajam. Rerata 800 Ribu penduduk bekerja di sektor ini. Sedangkan penduduk desa yang bekerja di sektor listrik, gas dan air minum masih sangat sedikit yaitu 4.097 orang, lebih banyak penduduk yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebanyak 15.240 orang.

TABEL C.3 PENDUDUK ACEH BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SELAMA SEMINGGU YANG LALU MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA  
 TABLE ACEH POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER WHO WORKED DURING THE PREVIOUS WEEK BY MAIN INDUSTRY  
 (TAHUN/ YEARS 2020 – 2022)

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA/ MAIN INDUSTRY*	LAKI-LAKI+PEREMPUAN/MALE+FEMALE					
	TAHUN/ YEARS					
	2020		2021		2022	
	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST	FEBRUARI FEBRUARY	AGUSTUS AUGUST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	833 121	768 465	784 580	739 071	795 898	834 334
2	8 379	11 384	7 841	8 638	6 585	15 240
3	105 322	114 287	87 325	113 912	132 479	108 169
4	5 913	4 614	4 385	4143	5 003	4 097
5	76 309	101 318	101 036	93 421	95 313	101 063
6	256 644	284 259	287 153	289 759	238 783	235 545
7	49 929	51 065	57 273	50 161	61 679	45 518
8	11 226	13 386	10 373	13 053	13 486	14 469
9	256 176	255 465	265 602	264 392	220 183	252 725
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1 603 019</b>	<b>1 604 243</b>	<b>1 605 568</b>	<b>1 576 550</b>	<b>1 569 409</b>	<b>1 611 160</b>

CATATAN/NOTE:

\*) 1. PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERBURUAN, DAN PERIKANAN / AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHERY 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN / MINING AND QUARRYING 3. INDUSTRI PENGOLAHAN / MANUFACTURING INDUSTRY 4. LISTRIK, GAS, DAN AIR MINUM / ELECTRICITY, GAS AND WATER 5. KONSTRUKSI / CONSTRUCTION 6. PERDAGANGAN, RUMAH MAKAN, DAN JASA AKOMODASI / TRADE, RESTAURANT AND HOTELS 7. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI / TRANSPORTATION, STORAGE AND COMMUNICATION 8. LEMBAGA KEUANGAN, REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN / FINANCING, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICE 9. JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN PERORANGAN / COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE



Jika membaca pada relasi antara pendidikan dan lapangan pekerjaan utama, dinyatakan bahwa tenaga kerja lulusan pendidikan penduduk Aceh di wilayah perkotaan paling banyak lulusan SMU yaitu sebanyak 270.954 orang. Setelah itu universitas yaitu sebanyak 164.102 orang. Di Banda Aceh, BPS menyatakan Kota Banda Aceh menjadi juara dalam Indeks SDM Unggul berada di urutan pertama daripada kota-kota lain di seluruh Indonesia. Pada 2021, 26,7% penduduknya berhasil menamatkan pendidikan tinggi. Jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 7,3%.

TABLE 11.2  
PENDUDUK ACEH BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SELAMA SEMINGGU YANG LALU  
MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG UTMATAKAN  
ACEH POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER WHO WORKED DURING THE PREVIOUS WEEK BY MAIN INDUSTRY AND EDUCATIONAL ATTAINMENT  
(AGUSTUS/AUGUST 2022)

BERKOTAH/LURAH  
LAKI-LAKI-BERBIJIAN / MALE+FEMALE

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA MAIN INDUSTRY (*)	TIDAK BAH PUNYA SEKOLAH NOT ATTENDING SCHOOL	TIDAK BAH TAMAT SD DID NOT COMPLETE/NOT MET COMPLETED PRIMARY SCHOOL	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN/ EDUCATIONAL ATTAINMENT						JUMLAH TOTAL
			SEKOLAH DASAR PRIMARY SCHOOL	S.L.T.P JUNIOR HIGH SCHOOL	S.L.T.A SENIOR HIGH SCHOOL UNIVERSITY GENERAL	KEJURUAN VOCATIONAL ACADEMY	DIPLOMA I/II/III AKADEMI DIPLOMA I/II/III ACADEMY	DIPLOMA IV/UNIVERSITAS DIPLOMA IV/UNIVERSITY	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	183	13 369	39 972	31 963	34 750	6 921	1 929	5 480	135 638
2	-	922	585	914	3 989	320	110	510	6 430
3	-	1 864	8 598	13 770	27 362	8 073	2 177	5 218	67 062
4	-	84	792	613	2 287	923	111	538	5 258
5	-	1 628	10 671	15 053	22 552	3 163	1 504	3 789	57 760
6	231	12 604	19 401	31 204	93 959	18 171	6 354	20 952	202 886
7	-	795	4 825	7 316	15 448	4 867	2 353	3 494	39 098
8	186	63	766	1 263	8 533	1 605	1 868	9 510	23 844
9	-	3 632	9 878	12 048	62 974	14 918	27 777	114 611	345 638
JUMLAH TOTAL	600	34 971	94 778	116 144	270 954	59 011	43 274	164 102	783 834

CATATAN/NOTE:

\*) 1. PERTANIAN, PERKEBUNYIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN, DAN PERIKANAN / AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHERY 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN / MINING AND QUARRYING 3. INDUSTRI PENGOLAHAN / MANUFACTURING INDUSTRY 4. LISTRIK, GAS, DAN AIR PANAS / ELECTRICITY, GAS AND HOT WATER 5. KONSTRUKSI / CONSTRUCTION 6. PERDAGANGAN, PERUMAHAN, DAN JASA AKOMODASI / TRADE, RESTAURANT AND HOTELS 7. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI / TRANSPORTATION, STORAGE AND COMMUNICATION 8. LEMBAGA KEUANGAN, REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN / FINANCIAL, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICE 9. JASA KEHIMPUNAN SOSIAL, DAN PERORANGAN / COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE

Sedangkan kalau membaca kondisi ketenagakerjaan berdasarkan kabupaten-kabupaten di Aceh, BPS menyatakan bahwa kota Lhokseumawe memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka paling besar daripada kabupaten-kabupaten lain yaitu sebesar 11.16 persen. Sedangkan daerah yang memiliki TPT terkecil yaitu kota Bener Meriah yaitu sebesar 1.24 persen.

TABEL B.1  
TABLE

PENDUDUK ACEH BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG TERMASUK ANGGKATAN KERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA  
ACEH POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER WHO ARE IN LABOR FORCES BY REGENCY/MUNICIPALITY  
(TAHUN/ YEAR) 2020 - 2022

KABUPATEN/ KOTA REGENCY/ MUNICIPALITY	AGUSTUS/AUGUST 2020			TAHUN/ YEARS AGUSTUS/AUGUST 2021			AGUSTUS/AUGUST 2022		
	BEKERJA/ WORKING	TERBUKA/ UNEMPLOYMENT	TPT(%)	BEKERJA/ WORKING	TERBUKA/ UNEMPLOYMENT	TPT(%)	BEKERJA/ WORKING	TERBUKA/ UNEMPLOYMENT	TPT(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SIMEULUE	43 819	2 535	5,47	44 964	3 725	8,31	41 268	2 632	6,39
ACEH SINGKIL	45 980	4 129	8,98	47 474	4 333	9,14	44 856	3 313	7,38
ACEH SELATAN	101 713	7 116	6,95	102 703	7 090	6,86	106 060	5 371	5,02
ACEH TENGGARA	99 301	6 030	6,07	97 983	6 733	6,87	98 670	5 290	5,36
ACEH TIMUR	172 680	13 526	7,83	169 091	12 989	7,68	187 569	14 716	7,85
ACEH TENGAH	116 594	3 670	3,15	113 900	3 056	2,68	113 939	5 288	4,64
ACEH BARAT	86 102	6 777	7,87	88 790	6 777	7,63	87 930	5 706	6,49
ACEH BESAR	173 332	14 294	8,25	181 190	15 121	8,35	194 117	17 528	9,03
FIDJE	201 426	13 890	6,90	187 284	14 705	7,85	209 079	13 214	6,32
BIREUEN	223 443	9 590	4,29	223 237	10 084	4,51	232 404	9 783	4,21
ACEH UTARA	244 356	22 877	9,37	241 329	21 676	9,03	239 537	18 254	7,62
ACEH BARAT DAYA	61 656	2 525	4,09	63 268	2 663	4,21	65 692	2 825	4,30
GAYO LUES	54 422	1 119	2,05	51 023	957	1,87	51 996	1 443	2,77
ACEH TAMIANG	125 650	10 878	8,66	133 865	8 355	6,24	133 028	10 601	7,97
NAGAN RAYA	77 850	4 189	5,38	77 464	4 071	5,26	80 071	4 967	6,21
ACEH JAYA	50 080	2 129	4,25	49 543	1 780	3,59	49 490	1 561	3,14
BENER MERIAH	86 050	1 180	1,37	82 201	1 033	1,24	84 713	2 267	2,68
FIDJE JAYA	68 507	4 824	7,04	66 881	3 478	5,19	67 784	3 121	4,60
KOTA BANDA ACEH	118 637	12 510	10,54	124 460	8 94	7,18	118 876	11 213	9,43
KOTA SABANG	17 194	869	5,06	15 704	579	3,68	16 051	704	4,39
KOTA LANGSA	77 618	8 389	10,80	81 655	6 346	7,77	78 674	6 700	8,51
KOTA LHOKESEUMAWE	92 696	11 262	12,14	86 031	10 804	12,56	89 894	9 059	10,08
KOTA SUBULUSSALAM	30 667	2 298	7,49	31 261	2 087	6,68	33 496	2 042	6,10
JUMLAH/ TOTAL	2 359 995	166 600	7,08	2 361 300	158 657	6,72	2 394 994	157 568	6,58



Kondisi Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2022 / Labour Force Situation in Aceh Province August 2022

### III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

#### – BIDANG KESEHATAN

##### 1. Anggaran Kesehatan Provinsi Aceh.

- Struktur APBD Provinsi Aceh tahun 2023 untuk bidang kesehatan untuk belanja daerah sebesar Rp.294.084.700.381,- dengan belanja operasional sebesar Rp.223.864.907.216,- dan belanja modal sebesar Rp.70.219.793.165,-
- Untuk Anggaran DAK Fisik Provinsi Aceh tahun 2023 sebesar Rp.501.520.010.770,- dengan menitikberatkan pada tiga program kegiatan, yaitu penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting, pengendalian penyakit, serta penguatan sistem kesehatan.
- DAK Non Fisik untuk tahun 2023 sebesar Rp.487.410.567.194,- dengan rincian untuk BOK Provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas.
- Prioritas pembangunan kesehatan Aceh untuk tahun 2023 adalah:
  - Meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup;
  - Menurunkan Persentase Balita Stunting;
  - Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup;
  - Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup, dan;
  - Persentase Rumah Sakit Regional Yang Fungsional di 5 Kabupaten/Kota serta iuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

- Kendala yang dihadapi:
  - Masih banyak tenaga kesehatan di daerah yang belum terlatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.
  - Masih ada Tenaga Gizi Puskesmas (TPG) yang belum melakukan penginputan data Balita kedalam aplikasi Elektornik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) akibat dari kekurangan fasilitas pendukung yang diperlukan.
  - Sumber Daya Kesehatan di daerah Kabupaten/Kota masih mempunyai tantangan dalam jumlah, distribusi dan kompetensi yang belum memadai terutama 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar di Puskesmas. Dari total 362 Puskesmas yang ada di Aceh, baru 257 Puskesmas yang memenuhi standar dan 105 Puskesmas belum memenuhi standar 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar.
  - Tidak adanya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penempatan atau pendistribusian Tenaga Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota.
  - Untuk pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Aceh ketersediaan anggaran belum sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. Gambaran Penyakit Menular di Aceh

Jumlah kasus TBC Sensitif Obat di Aceh yang ditemukan dan diobati pada tahun 2022 adalah sebanyak 11.080 kasus. Kasus terbanyak terdapat pada Kabupaten Pidie sebanyak 1.154, sedangkan kasus terendah terdapat di Kota Sabang sebanyak 31 kasus.

No	Kabupaten/ Kota	Total kasus
1	Kab. Simeulue	202
2	Kab. Aceh Singkil	197
3	Kab. Aceh Selatan	772
4	Kab. Aceh Tenggara	352
5	Kab. Aceh Timur	824
6	Kab. Aceh Tengah	267
7	Kab. Aceh Barat	290
8	Kab. Aceh Besar	437
9	Kab. Pidie	1.154
10	Kab. Bireuen	876
11	Kab. Aceh Utara	1.021

12	Kab. Aceh Barat Daya	265
13	Kab. Gayo Lues	226
14	Kab. Aceh Tamiang	452
15	Kab. Nagan Raya	385
16	Kab. Aceh Jaya	147
17	Kab. Bener Meriah	108
18	Kab. Pidie Jaya	167
19	Kota Banda Aceh	1.131
20	Kota Sabang	31
21	Kota Langsa	486
22	Kota Lhokseumawe	874
23	Kota Subulussalam	416
<b>Total</b>		<b>11.080</b>

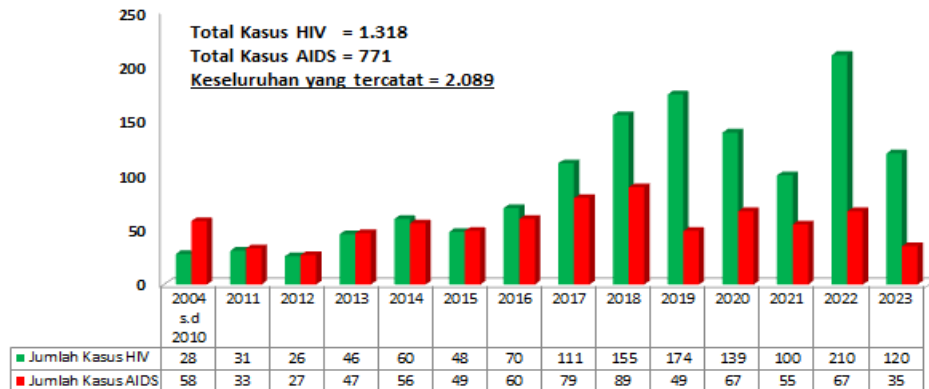
Secara capaian persentase penemuan dan pengobatan Kasus TB di Aceh pada tahun 2022 sebesar 55% dari total kasus estimasi 20.125. Sementara kasus sembuh dan pengobatan lengkap sebesar 89% dari target 90%.

Penemuan kasus tahun 2023 (Januari-Juni) sudah 22% dari total kasus 21.289, dengan kasus sembuh dan pengobatan lengkap Januari – Juni tahun 2023 sebesar 77%.

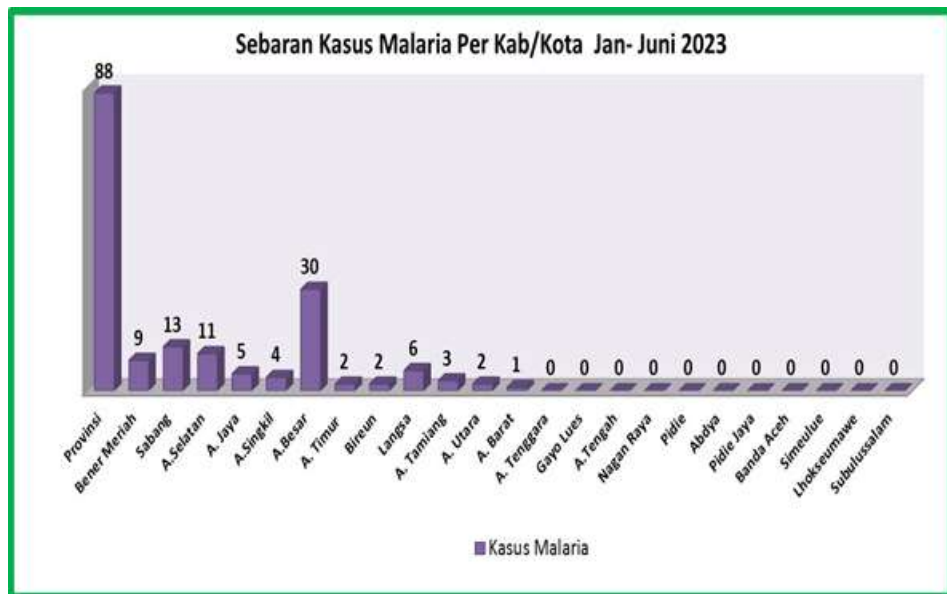
Terkait TB Resisten Obat pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 30% atau 177 kasus.

Untuk HIV/AIDS, secara keseluruhan kasus HIV/AIDS di Aceh dari tahun 2004 - 2023 yang tercatat sebanyak 2.089 kasus tersebar di 23 kabupaten/kota.

Kasus HIV/AIDS Januari – Juni 2023 yang sudah ditemukan sebanyak 155 kasus (120 HIV dan 35 AIDS). ODHIV mulai Anti Retroviral Theapi (ART) pada tahun 2022 sebesar 100% dai total kasus 277 kasus.

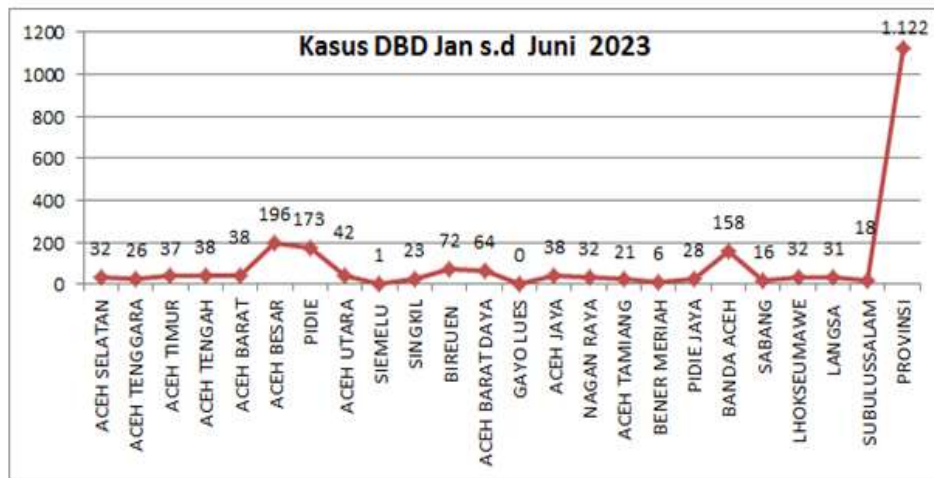


Sedangkan untuk malaria, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, kabupaten/kota yang sudah eliminasi malaria sebanyak 22 kabupaten/kota. Hanya 1 kabupaten lagi yaitu Kabupaten Aceh Jaya yang direncanakan penilaiannya tahun 2023. Terkait kasus malaria di Aceh pada tahun 2022 sebanyak 137 kasus, jauh menurun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 324 kasus. Sementara Januari – Juni 2023 terdapat 88 kasus (Aceh Jaya sebanyak 5 kasus).



Untuk DBD, pada tahun 2022 sebanak 2.079 kasus, kasus terbanyak terjadi di Kota Banda Aceh yaitu 366 kasus. Periode Januari – Juni 2023 sudah terdapat 1.122 kasus dengan kasus terbanyak di Aceh Besar yaitu 196 kasus.

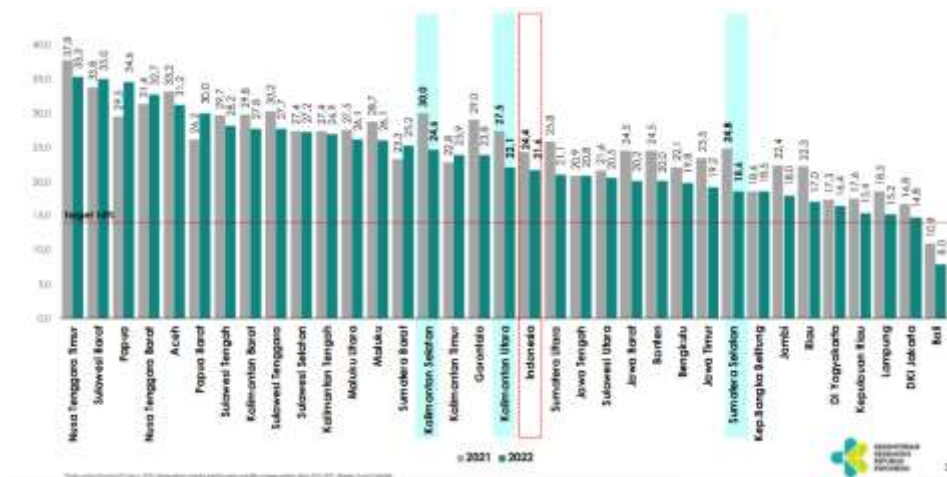
## Data Tahun DBD 2023



### 3. Penanganan Stunting

Berdasarkan data EPPGBM bulan Juni tahun 2023 Prevalensi Anak Stunting di Provinsi Aceh menunjukkan 6,76 % dari jumlah Balita 395.069 anak. Dari 23 Kabupaten/Kota terdapat 3 Kabupaten/Kota tertinggi diantaranya Kota Subulussalam 25,28%, Pidie Jaya 13,98% dan Bener Meriah 11,98 %. Berikut Grafik Prevalensi Anak Stunting Provinsi Aceh Periode Bulan Juni tahun 2023.

Berdasarkan data SSGI pada Tahun 2022 angka stunting secara nasional masih di angka 31,2 walaupun sudah ada penurunan, namun masih berada pada urutan 5 secara nasional. Dengan mengacu pada angka stunting yang masih tinggi belum berani memberikan target yang sama dengan target nasional pada Tahun 2024 tetapi menetapkan target nasional sebesar 19,01 persen dan ini pun bukan pekerjaan yang ringan dan sangat dibutuhkan dukungan, komitmen dan kerjasama dari semua pihak.



Kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting adalah:

- pada koordinasi, konvergensi dan integrasi program dan kegiatan.
- masih terdapat pemahaman yang berbeda pada pelaksanaan aksi konvergensi
- penyusunan dan pelaksanaan program yang masih belum maksimal, terutama masih lemahnya SDM tim pendamping dan belum terlibatnya masyarakat secara menyeluruh.
- kolekting data dan masih lemahnya kesekretariatan TPPS baik Prov, kota/kabupaten, dan desa.

#### 4. Pengawasan Obat dan Makanan

Selain Balai POM di Banda Aceh, terdapat 2 Loka POM yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, dengan wilayah kerja melakukan pengawasan untuk 4 kabupaten dan Kabupaten Aceh Selatan dengan wilayah kerja 2 kabupaten dan 1 kota.

Kendala yang dihadapi :

- Wilayah kerja Balai Besar POM Banda Aceh beserta loka meliputi 23 Kabupaten/Kota dengan jumlah sarana yang banyak dan tersebar luas dengan jarak tempuh antar cukup jauh. Sementara jumlah SDM terbatas. Hal ini menyebabkan belum semua sarana dapat diperiksa dan diawasi secara menyeluruh.
- Masih kurangnya kepatuhan dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

- Dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan belum maksimal, sehingga masih kurangnya respon tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait hasil pengawasan obat dan makanan.

#### 5. Pelaksanaan JKN di Provinsi Aceh

Peserta JKN per 30 Juni 2023 sebanyak 5.388.175 atau sebesar 99,19%. Untuk keaktifan peserta sebesar 98,94%, atau sebanyak 5.374.523 peserta.

Jumlah FKTP yang bekerjasama tahun 2023 sebanyak 625 FKTP, berkurang 5 dari tahun 2022 sebanyak 630 FKTP. Dari 625 FKTP tersebut, sebanyak 58% adalah Puskesmas, sisanya adalah klinik swasta, klinik TNI/Polri, dokter/dokter gigi praktik mandiri, dan RS type D Pratama.

Kendala yang dihadapi adalah terkait kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Aceh tentang Jaminan Kesehatan Aceh, dimana masih terdapat hutang iuran untuk tahun 2022 sebesar Rp.64.297.131.300,- sekaligus terdapat kewajiban pembayaran iuran atas penetapan peserta tahun 2023, sehingga masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp.700.000.000.000,- untuk mencukupi kekurangan penganggaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh.

### – **BIDANG KETENAGAKERJAAN**

#### 1. Pagu Anggaran Ketenagakerjaan

Pagu Anggaran Ketenagakerjaan di provinsi Aeh terdiri dari dua sumber dana APBA dan APBN. Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 17.292.925.830 dan pada tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.763.517.384, dengan target program sebagai berikut :

Tahun	Sumber	Pagu Anggaran	Target Utama
2022	APBA	Rp. 13.490.957.830	Program Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan



2022	APBN	Rp.3.801.968.000	Program Pendidikan dan Pembinaan baik pada bidang penempatan kerja, pengawas Ketenagakerjaan dan hubungan Industrial
2023	APBA	Rp.10.342.471.384	Program Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan
2023	APBN	Rp. 3.421.046.000	Program Pendidikan dan Pembinaan baik pada bidang penempatan Tenaga kerja, Pengawas Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah Provinsi Aceh selama tahun 2022 hingga Juli 2023 antara lain :

- Rendahnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang berdampak pada rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja
- Rendahnya kesempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang berdampak pada pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
- Belum Optimalnya Peran Lembaga Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja
- Keterbatasan Tenaga Mediator Hubungan Industrial dan pegawai pengawas Ketenagakerjaan serta sarana prasarana yang kurang memadai

## 2. Data Perusahaan dan Tenaga Kerja

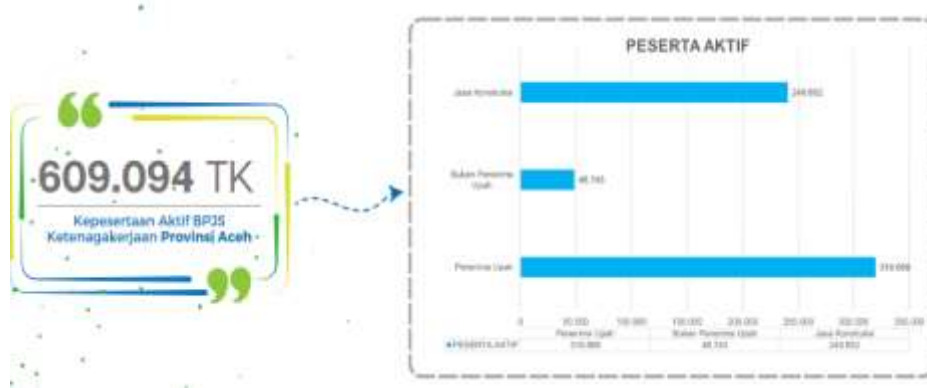
Adapun jumlah Perusahaan dan Tenaga kerja di Provinsi Aceh berdasarkan WLKP (Online) adalah sebagai berikut :

<i>Jenis Perusahaan</i>	<i>Jumlah Perusahaan</i>	<i>Tenaga Kerja</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Mikro</i>	7.521	Laki-laki	45.164
<i>Kecil</i>	545		
<i>Menengah</i>	362	Perempuan	9.794
<i>Besar</i>	116		
<i>Total</i>	8.544	Total	54.958

## 3. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Adapun kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Aceh pada Periode 10 Juli 2023





Hambatan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja formal adalah sebagai berikut :

- Kepatuhan badan usaha wajib daftar yang masih rendah
- Perizinan usaha melalui OSS syarat sudah terdaftar dalam kepesertaan tidak merupakan mandatori. Berbeda pada saat sebelum berlakunya OSS badan usaha yang ingin mengajukan izin usaha wajib mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan
- Dengan adanya program JKRA, pemberi pekerja merasa sudah cukup untuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja
- Sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerja atau sebagian tenaga kerja belum terlaksana dengan optimal

4. Banyak PMI dari Aceh yang berangkat secara non prosedural. Mereka berangkat melalui Kepulauan Riau dan Kualanamo. Meski begitu, BP3MI hanya menangani satu orang dari banyak PMI yang tak berdokumen tersebut untuk tahun 2021, 2022 dan 2023. Sedangkan untuk PMI yang menjadi korban TPPO selama tahun 2021 sebanyak 3 orang. Begitupun tahun 2023 sebanyak 3 orang. Sedangkan tahun 2023 hingga bulan juli terdapat 1 kasus yang ditangani.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi BP3MI dalam melaksanakan tugas perlindungan pada PMI adalah :

- Tidak adanya perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) pusat ataupun cabang yang ingin keluar negeri melalui skema P to P (Penempatan kerja melalui perusahaan) harus mengikuti seleksi di luar provinsi Aceh
- Beberapa negara penempatan memiliki alat standar kesehatan yang dipasang khusus pada Rumah sakit/ klinik tertentu. Hambatannya, SARKES CPMI yang ingin MCU untuk beberapa negara tertentu harus berangkat keluar dari Provinsi Aceh
- Luasnya wilayah kerja Provinsi Aceh dan minimnya Anggaran sosialisasi BP3MI Aceh terkait penempatan dan perlindungan PMI secara prosedural menjadi tantangan besar bagi BP3MI Aceh untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berada di 23 Kabupaten/kota Provinsi Aceh
- Cara PMI asal Aceh bekerja ke luar negeri terutama untuk negara penempatan Malaysia tidak sesuai peraturan yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Kebanyakan warga Aceh yang bekerja ke negara penempatan Malaysia berangkat dengan paspr tanpa visa kerja. Beberapa tahun bekerja di Negara penempatan, Visa kerja/Permit dikeluarkan oleh user/majikan. Hal itu membuat petugas imigrasi dan BP3MI Aceh kesulitan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen PMI karena diawali dengan keberangkatan tanpa dokumen.

#### **IV. REKOMENDASI**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan dukungan anggaran khusus untuk pengembangan RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, terutama dalam hal pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (terutama dokter spesialis), kurangnya kapasitas pada instalasi gawat darurat, serta kurangnya fasilitas medis seperti CT-Scan dan MRI.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan BKKBN RI berkolaborasi dalam tugasnya masing-masing untuk melakukan intervensi spesifik dan intervensi

sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh mengingat masih tingginya angka stunting di Provinsi Aceh.

3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan jumlah peserta aktif BPJS, terutama kepesertaan pekerja rentan
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan lembaga terkait untuk memperbanyak lapangan pekerjaan dengan memastikan dapat menyerap banyak tenaga kerja dari Aceh

## **V. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada masa reses ke Provinsi Aceh ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Provinsi Aceh beserta seluruh SKPD dan instansi terkait, serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 -2023, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2023

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI ACEH  
KETUA TIM,**

**Ttd.**

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

**A-425**